

PERAN AUDITOR DALAM MEMVERIFIKASI SUSTAINABILITY REPORT DI PERUSAHAAN INDONESIA

Mellinda Vellin^{*1}, Helen Irawan², Jaslin Setiana³

^{1,2,3}Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: mellindahuang7@gmail.com

Abstract.

Sustainability reports have become a requirement for companies to publish reports at the end of each year with the aim that companies can find out about operational activities carried out not only to focus on making profits but also to be used as a reference and obligation to be responsible for the influence given to environment and society through the activities it generates. Sustainability reports need to be examined or evaluated by an auditor before being published to find out whether the efforts and programs implemented by the company are appropriate and can have good or bad impacts from an economic, environmental and social perspective. Auditors can provide further verification after evaluating a company's sustainability report and the company can take this verification as material in making better programs in the future. However, this day the demands on companies to publish sustainability reports have not been fully implemented even though regulations have stipulated that companies must publish sustainability reports every year. With this, the author wants to analyze the reasons why some companies have not published sustainability reports, to the sanctions that can be obtained if the company does not publish a sustainability report. The technique used to collect data sources with qualitative methods and secondary data.

Keywords: *the role of auditor, sustainability report, company, verification*

1. PENDAHULUAN

Perusahaan menurut (Willem Molengraaff, 1858-1931) adalah entitas yang menjalankan kegiatan operasional dengan terus menerus secara berkelanjutan melalui transaksi penjualan barang, perjanjian ataupun penyerahan barang dalam transaksi jual beli dengan tujuan mendapatkan pendapatan. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin maju sekarang, perusahaan diharuskan tidak hanya menerbitkan laporan finansial namun juga diharuskan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan dengan tujuan untuk mengetahui kegiatan operasional yang dijalankan selain mendapatkan keuntungan tetapi juga memberi pengaruh dalam bentuk tanggung jawab bagi lingkungan serta masyarakat atas apa yang ditimbulkan oleh perusahaan.

Pada era ini, dapat diperkirakan bahwa keadaan Bumi cukup memprihatinkan, dengan munculnya fenomena-fenomena baru yang secara berkelanjutan yang dapat menjadikan bumi memiliki tingkat kualitas yang buruk dan diperkrikan juga sumber daya alam yang dapat punah karena digunakan oleh manusai dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Hal ini dibuktikan oleh World Meteorological Organization (WMO) yang memberikan *warning* mengenai perubahan iklim yang sering terjadi pada saat ini. Perlu

diketahui, perubahan ini adalah penyebab terjadinya beberapa fenomena seperti peningkatan gas rumah kaca, volume air laut yang meningkat, dan lain sebagainya yang dapat merugikan para masyarakat sendiri.

Selain itu, pada tahun 2020 sempat terjadinya peningkatan senyawa CO₂ atau karbon dioksida sebesar 413,2 bagian per satu juta saat itu. Pada bulan Juni dan Juli, Amerika telah terjadi gelombang panas yang berdampak pada kesehatan masyarakat sekitaran. Maka dari itu, para ilmuwan dan para ahli hingga saat ini terus memikirkan cara dalam mengatasi permasalahan iklim tersebut, seperti dengan melakukan peninjauan atau observasi pada perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan operasionalnya. Kegiatan operasional yang mana berdampak pada lingkungan sekitar dan sosial. Dengan permasalahan iklim yang tidak terbarukan ini, perusahaan terdorong untuk melakukan program-program positif dengan harapan dapat memberikan dampak positif yang bisa dirasakan tidak hanya untuk perusahaan namun masyarakat hingga lingkungan.

Semua kegiatan perusahaan dalam menjalankan kegiatan dituangkan dalam laporan keberlanjutan, diharapkan bahwa data laporan yang disajikan oleh perusahaan juga dapat menyadarkan pihak manapun dalam lebih memperhatikan kegiatan yang dilakukan dan menguntungkan segala pihak. Pada tahun 2020, PT BUMI Resources Tbk dengan kode saham BUMI adalah salah satu perusahaan yang dinominasikan oleh Foundation for International Human Rights Reporting Standard dan United Nations Development Programme sebagai perusahaan yang meraih penghargaan A+ dengan penerbitan laporan keberlanjutan terbaik. Penilaian ini berdasarkan kesesuaian dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pada Nomor 51 Tahun 2017 menjelaskan Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Emiten, Perusahaan Publik, Lembaga Jasa Keuangan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Business and Human Rights kepada seratus lima puluh empat perusahaan terbuka yang ada di Indonesia (CNBC Indonesia, 2021).

Di balik laporan yang telah diterbitkan, perusahaan perlu menyajikan laporan tersebut kepada seorang auditor untuk diverifikasi terlebih dahulu. Auditor perlu memastikan informasi yang disajikan dan melakukan evaluasi pada kegiatan-kegiatan keberlanjutan yang dilakukan perusahaan dapat terbukti keandalannya, auditor juga dapat memberikan pandangannya terhadap perusahaan atas program yang dijalkannya (accounting.binus.ac.id). Berawal dari terlaksannya kegiatan-kegiatan perusahaan melalui program yang dapat berdampak positif maupun negatif dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungannya. (Nurul Fachriyah, SE., MSA., Ak., 2019) Tanggung jawab seorang auditor sangat besar dalam memberikan verifikasi pada laporan keberlanjutan perusahaan, tidak hanya itu perusahaan juga dapat menggunakan masukan atau verifikasi auditor sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan program yang lebih baik pada kedepannya, potensi ini juga dapat berpengaruh baik bagi lingkungan masyarakat, komunitas dan pemangku kepentingan serta pemegang saham. Alasan perusahaan perlu dalam menerbitkan laporan keberlanjutan yaitu (jurnal.id):

1. Terjadinya peningkatan pada kinerja perusahaan dan dengan ini perusahaan dapat memperkirakan kegiatan hingga program yang dapat dijalankan secara langsung sejalan dengan aspek berkelanjutan.

2. Terjadinya peningkatan terhadap manajemen risiko sehingga dapat diperkirakan, dihindar maupun meminimalisirkan ketidakpastian tersebut yang berpotensi membahayakan serta mengancam perusahaan hingga terjadinya kerugian.
3. Pengembangan semangat pekerja, perusahaan dalam menyajikan laporan dimana laporan tersebut dapat memberitahu kondisi bagaimana kinerja perusahaan dalam melakukan kegiatan operasinya. Tidak hanya itu, pencapaian yang didapatkan perusahaan juga dapat memotivasi pada pekerja untuk mencapai tujuan yang lebih besar lagi pada kedepannya.

Persentase perusahaan dalam melaporkan laporan keberlanjutan semakin meningkat, pada tanggal 30 Desember 2021 tercatat sudah ada 154 perusahaan setara dengan 20% perusahaan yang telah menerbitkan dan melaporkan keberlanjutan 2020 melalui sistem SPE-IDXNet. Pada tahun 2019 sebelumnya hanya terdapat 54 perusahaan yang melakukan penerbitan laporan tersebut, ujar Risa E. Rustam, Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia. (majalahcsr.id, 2022)

Dengan ini penulis bertujuan untuk menganalisa alasan sebagian perusahaan masih belum menerbitkan laporan keberlanjutan dan sanksi apa yang akan didapatkan perusahaan jika tidak menerbitkan laporan keberlanjutan serta apakah peran auditor juga dapat mempengaruhi perusahaan dalam menerbitkan sebuah laporan keberlanjutan yang akan penulis susun pada artikel ini dengan judul “Peran Auditor dalam Memverifikasi Laporan Keberlanjutan di Perusahaan Indonesia”

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam pengumpulan data untuk menyusun laporan artikel yaitu dengan metode pendekatan kualitatif, dimana data-data yang didapatkan melalui data sekunder ini adalah sumber-sumber yang terpercaya seperti hasil studi literatur sehingga dapat mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan dari Direktur Keuangan dan SDM, Risa E. Rustam mengatakan bahwa terdapat 154 perusahaan di Indonesia yang sudah menerbitkan laporan keberlanjutan sampai dengan akhir tahun pelaporan 2021 (majalahcsr.id 2022) hal ini dapat membuktikan jika perusahaan-perusahaan semakin menyadari akan pentingnya menjalankan suatu bisnis usaha secara terus menerus dan berkelanjutan (investor.id). Dengan adanya keberadaan laporan yang berisikan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, kegiatan ini akan memberikan manfaat bagi pihak eksternal ataupun internal (accurate id, 2020). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak hanya mendapatkan reputasi yang baik di mata publik, namun juga bisa mendapatkan keuntungan yang banyak.

Penerbitan laporan keberlanjutan oleh perusahaan bukan hanya sembarang menerbitkan sebuah laporan, namun kegiatan ini didasarkan oleh beberapa landasan peraturan dalam penyusunan laporan ini. Peraturan ini sebenarnya sudah lama dibuat dalam Undang-Undang, namun masih terdapat beberapa perusahaan yang masih belum sadar akan pentingnya membuat laporan keberlanjutan ini. Sebagaimana yang

disebutkan dalam UU Nomor 24 tahun 2004 pada pasal 74 mengenai perseroan terbatas, yang mengatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab lingkungan dan sosial, dimana kewajiban dari perseroan tersebut harus diperhitungkan sebagai jumlah biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan. Dalam peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 memuat kebijakan mengenai kewajiban perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan. Tidak hanya itu apabila perseroan yang tidak menjalankan kewajiban ini akan dikenakan sanksi yang sudah diatur dalam peraturan tersebut.

Dalam penerbitan pelaporan keberlanjutan, perusahaan memerlukan pihak ketiga dalam melakukan verifikasi laporan keberlanjutan sehingga dapat disajikan secara jelas dan relevan sesuai dengan aktivitas yang sebenarnya dilakukan oleh perusahaan. Auditor dapat menjadi pihak ketiga yang membantu perusahaan dalam melakukan verifikasi atas laporan yang diterbitkannya, serta terdapat beberapa keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan dalam menjalankan proses tersebut, seperti: mampu membantu perusahaan dalam mengembangkan manajemen dan tata kelola yang lebih baik dalam mengelola *profit, people* dan *planet*. Kemudian diiringi dengan mempermudah investor dan para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan ekonomi yang tidak bisa didapatkan dari informasi finansial.

Disisi lain ternyata juga terdapat kelemahan ketika menggunakan jasa auditor dalam melakukan verifikasi laporan keberlanjutan seperti biaya yang dibutuhkan lebih besar karena membutuhkan pihak ketiga dan diperlukan pemahaman mengenai konteks keberlanjutan suatu perusahaan untuk dapat mengevaluasi dan menilai secara dalam, luas dan keseluruhan. Apabila laporan keberlanjutan diberikan jasa asurans oleh auditor, maka banyak manfaat yang dapat diperoleh investor, entitas, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya atau pengguna laporan keberlanjutan, yaitu:

1. Entitas memiliki peluang untuk melakukan perhitungan atau tolak ukur atas pengungkapan keberlanjutan serta meningkatkan keunggulan secara keseluruhan.
2. Entitas menjadi lebih percaya diri apabila dapat memenuhi laporan keberlanjutan yang sudah menjadi ketentuan yang diwajibkan.
3. Dapat memastikan kredibilitas, keandalan, dan keakuratan pengungkapan non keuangan dalam laporan tahunan dan terintegrasi.
4. Dapat mendorong entitas untuk meningkatkan sistem, proses dan pengendalian internal mengenai pengumpulan dan pelaporan data ESG (*Environmental, Social and Governance*).
5. Dapat memperkuat kesadaran internal entitas mengenai risiko dan peluang keberlanjutan yang material.

Dengan terus berkembangnya tren pelaporan keberlanjutan di Indonesia dan seiring berjalannya waktu, Indonesia mulai menerbitkan peraturan serta kebijakan mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1 pada awal tahun 2020, yang mengelompokkan sektor berdasarkan kegiatan usaha yang dapat mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. Tidak hanya itu, OJK juga menerbitkan

beberapa peraturan demi mewujudkan sistem keuangan dengan prinsip yang berkelanjutan, mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup, kebijakan peduli sosial dan lingkungan hidup dalam industri jasa keuangan, yaitu :

1. POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
2. POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).
3. SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Ikatan Akuntan Publik Indonesia juga melakukan suatu observasi terbatas dengan tujuan untuk mengidentifikasi bagaimana keadaan laporan keberlanjutan di Indonesia dari aspek kerangka pelaporan serta jasa asurans. Pengambilan sampel sebanyak 50 emiten yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia per 31 Maret 2022. Berdasarkan hasil observasi tersebut, ditemukan bahwa dari 50 sampel emiten tersebut, terdapat 33 emiten yang sudah menerbitkan laporan keberlanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebanyak 64% dengan menggunakan aturan GRI dan POJK 51, kemudian 30% emiten menggunakan aturan multiple (entitas menggunakan lebih dari dua kerangka seperti GRI, UNGC, SASB, SUSBA, dan SDGs), serta 6% sisanya menggunakan aturan POJK 51 (iapi.or.id, 2022).

Selanjutnya dari 33 entitas emiten, terdapat 13 emiten yang telah memperoleh asurans atas laporan keberlanjutan dan sebanyak (46%) 6 emiten dengan menggunakan AA1000AS *Moderate Level*. 46% sebanyak 6 emiten menggunakan ISAE 3000 *Limited Assurance*. Sisanya yaitu 8% sebanyak 1 emiten dengan menggunakan SPA 3000 Keyakinan Terbatas. Dari penelitian tersebut, juga didapatkan data mengenai pihak-pihak yang memberikan jasa asurans yang berasal 8% dari Kantor Akuntan Publik serta 92% selain dari Kantor Akuntan Publik.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan mengenai kewajiban setiap perusahaan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan dalam peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Dalam Pasal 10 ayat (1), ditetapkan bahwa setiap LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib untuk menyusun Laporan Keberlanjutan. Laporan Keberlanjutan wajib disusun secara terpisah dari laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan, yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) serta wajib disampaikan kepada OJK. Tidak hanya itu, LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib untuk mempublikasikan Laporan Keberlanjutan yang telah ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (1).

Pemerintah juga telah menetapkan peraturan pada setiap perusahaan yang mana wajib dalam menerbitkan laporan keberlanjutan dan apabila perusahaan tidak menjalankan peraturan tersebut maka akan mendapatkan hukuman yang telah diatur dalam peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 dalam Pasal 13. Pasal 13 yang berisikan pengaturan bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang tidak menyusun, menerbitkan laporan keberlanjutan, serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan maka akan diberikan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis (ojk.go.id, n.d.).

Melalui audit atas laporan keuangan, profesi akuntan publik wajib memiliki pengetahuan dan kompetensi yang tepat dalam membuat pertimbangan dan skeptisisme yang profesional ketika menjamin kredibilitas laporan keuangan. Tidak hanya itu, profesi akuntan publik juga harus menjaga *public trust* bagi investor, regulator, maupun para pemangku kepentingan lainnya. Dengan banyaknya peningkatan permintaan perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan, akuntan publik harus mengambil peran dalam menjaga kredibilitas dan *public trust* laporan keberlanjutan. Melalui segala kompetensi, pengetahuan, penerapan pertimbangan dan skeptisisme yang profesional sebagai landasan dasar untuk setiap auditor dalam melakukan audit terhadap mengaudit suatu laporan keuangan. Dalam melaksanakan hal itu, akuntan publik akan mempersiapkan diri dalam meningkatkan kompetensi serta pengetahuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, dalam memenuhi permintaan jasa asurans atas laporan keberlanjutan, IAPI membentuk sebuah tim dengan nama Tim Task Force Extended External Reporting dengan tujuan melaksanakan kajian serta menyusun suatu konsep panduan dan sosialisasi secara berkelanjutan.

Pada bulan September hingga Desember tahun 2022, Task Force Extended External Reporting Team melakukan tahap finalisasi panduan Penerapan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi) pada Perikatan Asurans Pelaporan Keberlanjutan dan Pelaporan Eksternal yang Diperluas (PED). Penyusunan untuk publik atau *limited hearing* dilakukan pada bulan September 2022, sedangkan untuk tahap finalisasi dilakukan di bulan Desember 2022. Secara kolateral, Dewan Standar Profesional Akuntan Publik (DSPAP) I sedang masuk dalam proses tahap pengadopsian International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) dan ISAE 3410 (Revised). Desember 2022 merupakan jadwal tahap finalisasi ISAE m3000 (Revised) untuk publik atau *limited hearing* sedangkan ISAE 3410 (Revised) dijadwalkan pada Maret 2023.

Akuntan publik dapat menjadi salah satu bagian dari perubahan dunia yang lebih baik. Seperti kata bijak dari Mahatma Gandhi, "*You must be the change you wish to see in the world*". Diharapkan penyatuan seluruh semangat, aspirasi serta kemampuan pada setiap akuntan publik dapat berperan penting dalam mendukung dan mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Dari adanya usaha pembudidayaan rumput laut didesa Kertasari ini sangat Pertumbuhan perekonomian seiring berjalannya waktu juga diikuti dengan meningkatnya persentase perusahaan dalam menerbitkan laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan sudah menjadi sebuah kewajiban bagi perusahaan dalam menerbitkan laporan pada setiap akhir tahun periode dengan tujuan agar perusahaan dapat mengetahui kegiatan operasional yang dilakukan tidak hanya untuk berfokus dalam mencari keuntungan melainkan juga digunakan sebagai acuan serta keharusan dalam bertanggungjawab atas pengaruh yang diberikan kepada lingkungan dan masyarakat melalui aktivitas yang ditimbulkannya. Dengan ini, Indonesia menerbitkan peraturan mengenai kewajiban penerbitan pelaporan keberlanjutan yang sudah ditetapkan dalam peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017. Dari peraturan OJK yang

diterbitkan, hal ini dapat mendukung semua perusahaan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan, karena jika laporan ini tidak diterbitkan maka mereka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis yang sudah diatur dalam Pasal 13. Dalam menerbitkan laporan tersebut, perusahaan memerlukan auditor untuk memverifikasi pelaporan keberlanjutan sehingga dapat disajikan secara relevan. Tidak hanya itu, dalam melakukan pelaksanaan pemeriksaan dibutuhkan informasi mencakup kondisi dan peristiwa beserta bukti-bukti yang mampu mendukung untuk meminimalisir kesalahan dari auditor. Oleh karena itu, masukan-masukan yang diberikan oleh auditor, perusahaan dapat menggunakannya sebagai evaluasi untuk program kegiatan yang lebih baik pada kedepannya.

REFERENSI

- Accurate.id. "Sustainability Report: Pengertian, Komponen, Manfaat Dan Contohnya." accurate.id, 2022. <https://accurate.id/marketing-manajemen/sustainability-report/>.
- Accounting.binus.ac.id. "Pentingnya Audit Sustainability Report – Accounting." accounting.binus.ac.id, 2020. <https://accounting.binus.ac.id/2020/04/29/pentingnya-audit-sustainability-report/>.
- Anam, Khoirul. "BUMI Kembali Raih A+ Laporan Keberlanjutan Terbaik." cnbcindonesia.com, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211202163953-17-296206/bumi-kembali-raih-a--laporan-keberlanjutan-terbaik>.
- Annisatulfitria. "Daftar Perusahaan Yang Menerbitkan Sustainability Report -." 2022. <https://www.esgi.ai/sustainability-report/>.
- Cho, Charles H., Giovanna Michelin, Dennis M. Patten, and Robin W. Roberts. "CSR Report Assurance in the USA: An Empirical Investigation of Determinants and Effects." *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal* 5, no. 2 (2014): 130–48. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-01-2014-0003>.
- Globalreporting.org. "GRI - GRI Standards." globalreporting.org. <https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-bahasa-indonesia-translations/>.
- Hadyarti, Vidi, and Tubagus M Mahsin. "Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Good Corporate Governance (Gcg) Sebagai Indikator Dalam Menilai Nilai Perusahaan." *Competence : Journal of Management Studies* 13, no. 1 (2020): 17–33. <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v13i1.6819>.
- Hartati, Euis Rita. "Makin Banyak Perusahaan Di Indonesia Jalankan Bisnis Berkelanjutan." investor.id. <https://investor.id/national/293510/makin-banyak-perusahaan-di-indonesia-jalankan-bisnis-berkelanjutan>.
- Iapi.or.id. "Newsletter - IAPI." iapi.or.id, 2022. <https://iapi.or.id/newsletter/>.
- Ibnu. "Sustainability Report: Pengertian, Komponen, Manfaat Dan Contohnya." accurate.id, 2020. https://accurate.id/marketing-manajemen/sustainability-report/#Manfaat_laporan_ini_bagi_pihak_internal.

- Jurnal.id. "Laporan Keberlanjutan Perusahaan, Pengertian Hingga Tujuan Dan Contohnya." jurnal.id. <https://www.jurnal.id/id/blog/laporan-keberlanjutan-perusahaan/>.
- Kompas.com. "Keadaan Bumi Saat Ini Halaman All - Kompas.Com." kompas.com, 2022. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/30/093000869/keadaan-bumi-saat-ini?page=all>.
- Majalahcsr.id. "Direktur BEI : Pelaporan Keberlanjutan Meningkatkan Seiring Naiknya Investor Di Indonesia - MajalahCSR.Id." majalahcsr.id, 2022. <https://majalahcsr.id/direktur-bei-pelaporan-keberlanjutan-meningkat-seiring-naiknya-investor-di-indonesia/>.
- Novianti, Tasha. "Bab II Tinjauan Pustaka BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sustainability Report 2.1.1 Definisi Sustainability Report." *Repository.Unisba.Ac.Id*, n.d. http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/2944/06bab2_tasha_novianti_10090311021_skr_2016.pdf?sequence=6&isAllowed=n.
- Ojk.go.id. "PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN, EMITEN, DAN PERUSAHAAN PUBLIK." https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Penerapan-Kuangan-Berkelanjutan-bagi-Lembaga-Jasa-Kuangan,-Emiten,-dan-Perusahaan-Publik/SAL_POJK_51_-_keuangan_berkelanjutan.pdf.
- Sorongan, Tommy. "Kondisi Bumi Makin Mengerikan, Ini Bukti-Buktinya." *cnbcindonesia.com*, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211101193505-4-288210/kondisi-bumi-makin-mengerikan-ini-bukti-buktinya>.